

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Kebijakan luar negeri adalah salah satu topik yang menarik dalam ranah Ilmu Hubungan Internasional. Kebijakan luar negeri menjadi perwujudan seperangkat visi dan tujuan suatu negara dalam meraih kepentingan nasionalnya dalam percaturan politik internasional. Tidak ada negara yang dapat mewujudkan kepentingan nasionalnya dan segala hal yang ingin dituju dalam interaksinya terhadap negara lain tanpa melalui kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri menjadi tujuan (yang meliputi kepentingan nasional yang hendak dituju), jalan (dalam hal ini strategi dan metode untuk mencapai kepentingan nasionalnya) dan cara (penggunaan kekuatan nasional) yang penting dalam interaksi suatu negara terhadap negara lainnya (Bojang, 2018, pp. 2–9). Pembahasan mengenai kebijakan luar negeri menjadi suatu cabang tersendiri dikarenakan kompleksitas dari beragam unsur yang terlibat di dalamnya melalui realita normatif (*das sollen*). Kebijakan luar negeri tidak dapat dijelaskan melalui satu teori umum tentang HI, dan membutuhkan analisis sistemik untuk menjelaskan keputusan suatu negara melalui kebijakan luar negerinya (Lobell et al., 2009, p. 11). Kebijakan luar negeri memiliki kekhususan dalam analisis, sesuatu yang kerap terlewatkan dalam kajian Hubungan Internasional terhadap ranah ini.

Kebijakan luar negeri memiliki aplikasi yang nyata dan sifat prediktif (*forecasting*) layaknya kebijakan publik. Kebijakan luar negeri menjadi aplikasi

praktis yang paling relevan dalam ranah Hubungan Internasional. Terdapat banyak implementasi nyata dari konsepsi kepentingan nasional di dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri suatu negara. Kebijakan luar negeri memiliki dampak dua arah terhadap politik global. Kebijakan luar negeri dapat memberikan implikasi terhadap dinamika politik global terlebih dari negara-negara *great powers*. Dinamika politik global pun dapat memberikan dampak terhadap kebijakan luar negeri suatu negara. Keduanya saling ditujukan untuk mendapatkan keuntungan dalam sistem anarki (Rose, 1998, p. 152). Sebagai ranah praktis, kebijakan luar negeri adalah topik yang relevan untuk negara manapun dan dalam waktu kapanpun. Kebijakan luar negeri akan terus berjalan. Hal ini menjadikan kebijakan luar negeri sebagai ranah yang menarik untuk diteliti dengan urgensi yang relevan dengan objek analisisnya, yaitu negara.

Turki memiliki kebijakan luar negeri yang bersifat ambivalensi, yang mendorong urgensi penelitian untuk dapat dilakukan. Turki memiliki pola ambivalensi dalam kebijakan luar negerinya terhadap Israel, terutama pada masa pemerintahan Presiden Erdoğan. Presiden Erdoğan adalah orang yang peka terhadap politik, dan terlibat dalam politik berdasarkan landasan-landasan bercorak Islam (Baykal, 2009, pp. 3–4). Partai AKP (*Adalet ve Kalkınma Partisi*) dan Presiden Erdoğan memiliki haluan politik historis *Neo-Ottoman*, yaitu sebuah pandangan politik yang condong kepada kekuatan politik Islam dan kejayaan Kesultanan Utsmaniyah di masa lampau. Haluan politik luar negeri pada masa Presiden Erdoğan didasarkan atas ambisi Turki untuk menjadi kekuatan regional yang kuat di wilayah politik Timur Tengah. Oleh karena itu, konsep kebijakan luar

negeri Turki bersifat cukup sensitif terhadap dua kutub politik di Timur Tengah, yaitu politik Islam dan relasinya dengan Barat (Murinson, 2006, pp. 947–948).

Ambivalensi ini terus terjadi hingga masa kontemporer. Bukti sejarah dapat dilihat dari alur konflik antara Israel dengan Palestina, yang mana Turki bersifat simpatik terhadap sisi Palestina, sebelum terjadinya operasi *Cast Lead* dan insiden kapal *Mavi Marmara* oleh Israel (Cohen, 2013, pp. 26–28). Turki mengecam negara-negara Islam yang melakukan kerjasama dan normalisasi hubungan dengan Israel. Dalam kasus ini adalah Uni Emirat Arab. Turki menganggap normalisasi hubungan yang dilakukan oleh negara-negara Arab sebagai bentuk kemunafikan atas kepentingan kolektif terhadap perjuangan Palestina (The Jakarta Post, 2020).

Namun, Turki justru menjadi salah satu mitra dagang terbesar Israel di Timur Tengah (World Bank, 2021). Pragmatisme Presiden Erdoğan dengan partainya, ambisi pemikiran *Neo-Ottoman*, serta struktur geopolitik regional dan politik domestik semakin mendorong Turki untuk menjadi kekuatan besar. Dan hal ini dilakukan dengan dukungan serta kerjasama bilateral pada bidang ekonomi dengan Israel. Insiden kapal *Mavi Marmara* diramalkan dapat memutus hubungan diplomatik dengan Turki, namun ternyata tidak. Rekonsiliasi hubungan diplomatik dilakukan dengan landasan ekonomi dan militer (Amidror, 2016, p. 4).

Kepentingan menjadi kunci dalam semua tindakan yang tertuang dalam kebijakan politik luar negeri Turki terhadap Israel. Ambivalensi dapat dengan jelas ditunjukkan oleh Turki dalam kebijakan politik luar negerinya. Oleh karena itu, judul penelitian ini memiliki simbolisasi sikap ambivalensi Turki melalui penggunaan kiasan Dewa Janus yang melambangkan sikap ambivalensi tersebut

dan pasukan Yenjiçeri yang melambangkan Turki sebagai kekuatan regional di kawasan Timur Tengah.¹

Ambivalensi ini dengan jelas terlihat di masa kepemimpinan Presiden Erdoğan dan dominasi partai AKP dalam sistem pengambilan kebijakan. Kebijakan luar negeri Turki (terutama dengan Israel) sangat pragmatis untuk mengisi ambisi untuk menjadi kekuatan regional yang berpengaruh, dan memperhitungkan struktur politik eksternal di wilayah Timur Tengah. Ambivalensi dan struktur permasalahan yang terjadi memiliki keunikan dan polanya berlanjut hingga ini. Ambivalensi dan keunikan tersebut menjadi alasan pemilihan topik riset kebijakan luar negeri ini.

1. 2. Perumusan masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang mengenai sikap Turki dalam hubungan bilateralnya terhadap Israel yang bercorak ambivalensi, maka pusat pertanyaan riset yang diajukan pada penelitian ini adalah :

“Mengapa Turki menerapkan kebijakan hubungan diplomatik bilateral dengan corak ambivalensi terhadap Israel pada masa kepemimpinan Presiden Erdoğan tahun 2014 – 2018”.

1. 3. Tujuan Penelitian

1. 3. 1 Tujuan Umum

Penelitian ini menjelaskan secara umum hubungan bilateral dan kebijakan luar negeri Turki terhadap Israel.

¹ Kalimat ini memiliki makna simbolik terhadap dinamika politik luar negeri Turki terhadap Israel. Penggunaan analogi dewa Janus dengan pasukan Yenjiçeri didasarkan atas relevansi konteks sejarah dari kekaisaran Turki Utsmani.

1. 3. 2 Tujuan Khusus

Penelitian ini juga memiliki tujuan khusus, yaitu menjelaskan alasan dibalik penerapan kebijakan luar negeri bercorak ambivalensi Turki terhadap Israel pada masa Presiden Erdogan tahun 2014 – 2018.

1. 4. Kegunaan Penelitian

1. 4. 1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini memiliki kegunaan atau manfaat yang secara utama ditujukan kepada bidang Hubungan Internasional. Penelitian ini bermanfaat untuk menjadi analisis yang mutakhir dan relevan terhadap fenomena hubungan bilateral, kerjasama dan kebijakan luar negeri suatu negara, dalam hal ini spesifik kepada hubungan bilateral Turki dengan Israel.

1. 4. 2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga memiliki manfaat untuk memahami faktor-faktor yang melandasi kebijakan luar negeri suatu negara, memecahkan permasalahan yang bersifat paradoks dalam perumusan kebijakan luar negeri dan memberikan pengetahuan tambahan yang bersifat strategis dalam kebijakan luar negeri suatu negara.

1. 5. Kerangka Teori

1. 5. 1 *Literature Review / State-of-the-Art*

Penelitian tentang hubungan bilateral yang terjalin antara Turki dan Israel bukanlah hal yang baru. Sebab, Turki dan Israel, pada masa kontemporer menjadi kekuatan regional di kawasan Timur Tengah, yang mendorong adanya riset terhadap perilaku politik luar negeri kedua negara ini. Terdapat banyak *paper* yang membahas tentang bagaimana dinamika dalam hubungan diplomatik bilateral antara Turki dengan Israel. Ada juga beberapa paper yang membahas pengambilan keputusan politik yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Turki, terhadap geopolitik regional pada khususnya, dan Israel pada umumnya. penulis akan menjelaskan juga kelebihan penelitian yang akan penulis lakukan dibandingkan literatur maupun riset mengenai topik terkait yang sudah ada. Kajian pustaka yang ada dalam sub-bab ini akan difokuskan kepada dua literatur riset dengan topik terkait. Yang pertama, akan berfokus kepada riset yang dilakukan oleh Lindenstrauss dan Gulen, tentang dinamika hubungan antara Turki dengan Israel yang memiliki tipe komparatif. Lalu, bagian kedua akan membahas literatur dari Siri Neset tentang proses pengambilan kebijakan pada masa Pemerintahan Partai AKP dan Presiden Erdoğan.

Riset yang tercantum dalam *report paper* yang ditulis oleh Gallia Lindenstrauss dan Berkay Gulen berjudul '*Old and New Dynamics: What Has Changed in Turkey-Israel Relations?*' merupakan hasil riset yang cukup kontemporer dalam melihat hubungan Turki dengan Israel. Riset ini membahas dinamika baik dan buruk dalam hubungan diplomatik Turki - Israel. Lindenstrauss

dan Gulen menjelaskan bagaimana pragmatisme Turki berjalan dalam sektor ekonomi dengan Israel, bertujuan untuk memperkuat dominasi politik partai AKP di dalam negeri. Namun penelitian ini tidak menjelaskan secara terperinci bagaimana ambivalensi diperankan Turki dalam hubungannya dengan Israel. Ada satu penjelasan yang menarik yang dapat dilihat dari sikap ambivalensi Turki, yaitu dalam perspektif ekonomi. Namun, perumusan kebijakan dan struktur politik regional yang menjadi aspek eksternal, tidak banyak dibahas. Proporsinya sangat kecil. Penelitian ini tidak mengeksplorasi banyak di bidang tersebut.²

Riset kedua merupakan literatur penelitian yang dilakukan oleh Siri Neset yang berjudul "*Turkish Foreign Policy: Structure and Decision Making*". Literatur ini merupakan salah satu riset yang cukup penting yang penulis butuhkan. Literatur ini mengungkap dengan cukup komprehensif dan lugas tentang garis struktur pengambilan keputusan, terutama untuk kebijakan luar negeri, dalam pemerintahan Turki. Literatur ini memiliki keunggulan dalam orisinalitas data, karena sebagian besar data adalah data primer, yang didapatkan dari wawancara pejabat-pejabat terkait (yang juga dinilai dekat dengan partai AKP dan Presiden Erdoğan), dan analisis dari para peneliti *think-tank* yang ada di Turki. Dalam literatur ini, dijelaskan bahwa Presiden merupakan otoritas tertinggi dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Presiden membawahi beberapa lembaga yang bersifat legislatif dan beberapa penasehat senior. Hal ini membuka peluang untuk mengembangkan hipotesis bahwa *groupthink* juga memiliki peran dalam penentuan

² Penulis tidak menemukan aspek eksternal perumusan kebijakan luar negeri di dalam penelitian ini. Namun, penelitian ini tetap menjadi salah satu acuan penulis dalam menyelesaikan penelitian yang dilakukan.

kebijakan luar negeri Turki karena penasehat-penasehat senior yang berada dalam lingkaran tersebut dipilih langsung oleh Presiden Erdoğan. Namun, literatur ini tidak membahas ambivalensi. Literatur ini berfokus pada struktur pengambilan kebijakan luar negeri dari aspek domestik dan lingkaran pemerintahan saja. Hal ini akan penulis kembangkan lebih lanjut dan lebih mutakhir.

Ketiga, terdapat skripsi yang ditulis oleh Andi Iswan Ilyas dari Universitas Hasanuddin yang berjudul “Ambivalensi Kebijakan Luar Negeri Turki Di Bawah Kepemimpinan Erdoğan Terhadap Israel”. Penelitian ini adalah literatur yang penulis rasa cukup dekat dengan konsep penelitian yang akan penulis lakukan. Sama-sama menggunakan pandangan *Neo-Ottoman* sebagai penentu pandangan internal terhadap kebijakan luar negeri. Namun, kerangka teoritis yang digunakan dalam literatur tersebut berbeda dengan apa yang akan digunakan oleh penulis. Penulis lebih menekankan detail dalam pembahasan Ambivalensi dan pragmatisme kebijakan Turki terhadap Israel menggunakan pandangan realisme neoklasik dan *groupthink*. Tatkala literatur yang hampir serupa menggunakan definisi konsep kerjasama luar negeri yang sedikit meminjam dari pandangan realisme klasik dan aspek idiosinkratik Presiden Erdoğan, penulis memberikan pembeda yang kontras dengan sudut pandang yang berbeda.

Maka dari itu, dua penelitian mutakhir tentang kebijakan luar negeri Turki terhadap Israel dan struktur pengambilan kebijakan luar negerinya sejauh ini belum menemukan benang merah. Aspek sinkronik dibatasi dengan topik yang mereka bawa. Beberapa penelitian sebelumnya memiliki kesamaan sifat. Seperti penelitian dari Eyal Berelovich, Mohammed Alsaftawi hingga Ibrahim Kalin. Pola yang

penulis temukan belum menunjukkan kebaruan yang komprehensif. Sejauh ini belum ada yang menggunakan kaca mata realisme neoklasik dan *groupthink* dalam mengkaji hubungan bilateral antara Ankara dengan Tel Aviv. Kesempatan dalam penelitian yang penulis miliki untuk dapat mengembangkan riset ini dengan lebih matang, teliti dan meyakinkan.

1. 5. 2. Teori Realisme Neoklasik

Teori pertama yang digunakan adalah teori realisme neoklasik. Teori ini penulis gunakan atas dasar penggunaan pisau analisis yang tepat guna. Realisme neoklasik, seperti namanya, menggabungkan unsur domestik dalam realisme klasik, dengan unsur struktur politik internasional seperti dalam neorealisme. Teori ini melihat dua variabel tersebut dalam menjelaskan perilaku negara. Maka, tidak seperti cabang teori realisme yang lainnya, realisme neoklasik adalah teori yang ditujukan untuk menjelaskan kebijakan luar negeri suatu negara (Rosyidin, 2020 p. 35). Realisme neoklasik memfokuskan pada perilaku negara yang kompleks, terutama di dalam bidang pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan dan terkadang tidak bisa dijelaskan hanya oleh realisme klasik maupun neorealisme (Rathbun, 2008, p. 297).

Kebijakan luar negeri tidak muncul begitu saja. Ada serangkaian proses yang perlu dilakukan, dan banyak pertimbangan yang dipikirkan matang-matang untuk menciptakan kebijakan yang bersifat strategis. Terdapat makna yang jelas dalam berbagai proposisi tentang diskursus perilaku negara. Sifat pragmatis adalah salah satu ciri dalam perilaku negara. Turki adalah salah satu dari negara-negara yang memiliki pragmatisme yang cukup kental. Sifatnya secara umum sering dinilai

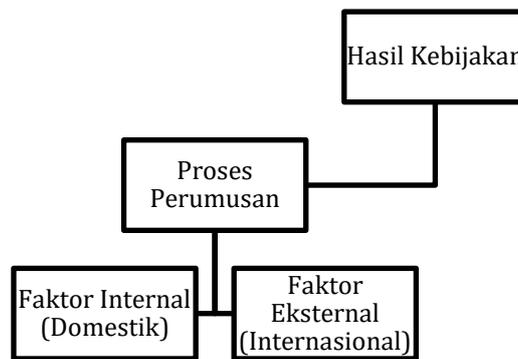
mencerminkan ambivalensi. Realisme neoklasik mencoba untuk mengatasi kekakuan pola pikir tentang sifat negara tersebut. Tidak kaku dalam melihat gambaran besar politik internasional, dan dalam pemilihan konsep analisis. Apa yang dijumpai oleh teori realisme neoklasik? Lebih jelasnya, teori ini menggunakan analisis *third image* dan *second image*, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan strategis yang tidak mampu dijelaskan melalui teori-teori bernuansa realis ataupun liberalisme dalam pandangan hubungan internasional, dan menjawab tujuan-tujuan yang hendak diraih oleh kebijakan luar negeri negara tertentu.

Sektor *third image* melihat sifat negara berdasarkan dinamika politik internasional, dan dalam beberapa kasus politik regional di kawasan negara tersebut. Sektor ini sering disebut sebagai faktor eksternal di dalam ranah studi Hubungan Internasional (Spindler, 2013, p. 133). Sektor *third image* berkaitan dengan distribusi kekuatan (ekonomi dan militer) dari negara-negara di sekitar, dan erat kaitannya dengan keamanan suatu negara. Sektor *third image* memberikan stimulus untuk perencanaan kebijakan luar negeri yang dilakukan di dalam negeri (Lobell et al., 2009, pp. 138–139).

Sektor *second image* melihat sifat negara berdasarkan dinamika politik domestik serta corak kekuasaan elit politik di negara tersebut. Sektor ini sering disebut sebagai faktor internal di dalam ranah studi Hubungan Internasional. Sektor *second image* berkaitan dengan perencanaan kebijakan luar negeri dan pemenuhan kepentingan nasional dari negara bersangkutan di sekitar, dan tetap memiliki perhatian yang dipusatkan terhadap keselamatan rezim (dan negara). Sektor *second*

image memberikan gambaran mengenai strategi kebijakan luar negeri suatu negara.

Agar lebih mudah dipahami, dapat dilihat melalui bagan di bawah ini.



Bagan 1. 1. Bagan siklus proses kebijakan politik luar negeri menurut Realisme Neoklasik. *Sumber : Diolah oleh Penulis*

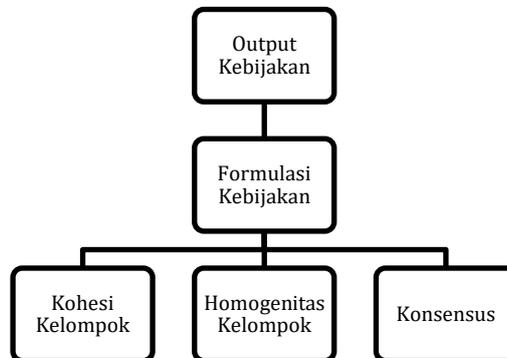
Teori realisme neoklasik memberikan pandangan kombinasi yang bersifat sistemik tentang pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara. Teori ini juga mengkaji dengan analisis sistemik, yang mana beragam kejadian dalam sektor internasional dan domestik menjadi satu bagian analisis yang komprehensif. Dalam landasan dasar realisme neoklasik, politik internasional masih bersifat anarki. Negara adalah aktor anarki dan sifat struktur internasional itulah yang mendorong negara memperebutkan kekuatan.³ Namun perumusan kebijakan berdasarkan kekuatan saja tidak cukup. Tekanan maupun peluang yang dilihat negara dalam politik internasional harus diterjemahkan sedemikian rupa. Tujuannya agar institusi domestik mampu melihat batasan dan peluang yang ada, dan merencanakan kebijakan yang strategis serta tepat guna (Lobell et al., 2009, pp. 13–16).

³ Konsep '*Struggle for Power*' yang dicetuskan oleh Hans Morgenthau.

Selain realisme neoklasik, pola pengambilan kebijakan suatu negara dapat dilihat melalui teori *groupthink*. Unik karena teori ini berakar dari ilmu komunikasi. Penerapannya mudah dipahami karena praktiknya sering ditemukan. *Groupthink* adalah istilah untuk menggambarkan pola pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsensus dan kohesi kelompok yang kuat, tidak memiliki kecondongan untuk melihat dari kacamata lain dan ditujukan untuk segera mencapai kesepakatan atas sebuah kebijakan (Janis, 1972 pp. 9).

1. 5. 3. Teori *Groupthink*

Groupthink adalah sebuah teori dan cara pandang mengenai birokrasi dan pola pengambilan kebijakan. Teori ini berargumen bahwa kohesi dan solidaritas kelompok berperan dalam perumusan suatu kebijakan, termasuk kebijakan luar negeri (Janis, 1972, pp. 115–116). Menurut *groupthink*, kebijakan politik luar negeri suatu negara adalah objek kerancuan, kesalahan sekaligus ketepatan tergantung dari pihak dan elit politik yang terlibat dalam pola birokrasi tersebut. Agar lebih mudah dipahami bagaimana alur kebijakan terbentuk melalui pola birokrasi *groupthink*, dapat disimak melalui bagan di bawah ini.



Bagan 1. 2. Bagan struktur *groupthink* dalam formulasi kebijakan. *Sumber : Diolah oleh Penulis*

Berdasarkan gambar bagan di atas dapat dipahami bahwa *groupthink* memiliki perhatian khusus kepada struktur kelompok yang meliputi koherensi kelompok, homogenitas atau kesamaan identitas dalam kelompok, dan konsensus. Koherensi kelompok adalah tingkat keeratn hubungan antara anggota kelompok. Semakin erat kohesinya, maka semakin kecil potensi perbedaan pendapat dan konflik di dalam kelompok.

Homogenitas adalah kesamaan identitas dalam kelompok. Kesamaan identitas akan berkaitan dengan kesamaan cara pandang dan tujuan yang hendak diraih. Identitas tersebut dapat bersifat hal yang nampak ataupun tidak nampak. Semakin besar homogenitas dalam kelompok, maka semakin kompak proses pembuatan keputusan dalam kelompok tersebut.

Konsensus adalah kemampuan kelompok untuk menyatukan suara dan meniadakan pandangan-pandangan yang berlawanan dengan nilai kelompok. Hal ini berkaitan dengan kebulatan suara dan satu kesatuan pendapat melalui data yang selektif (Janis, 1972, pp. 197–198). Dalam pandangan *groupthink*, kebijakan

dirumuskan bersama-sama. Penekanan difokuskan kepada konsensus dengan mengurangi hal-hal yang berlawanan dengan pemikiran kelompok serta memperkuat opsi kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan pemikiran anggota-anggota kelompok. *Groupthink* dapat diibaratkan seperti pedang dalam dua mata. Satu sisi bisa menguntungkan, tapi di sisi lain dapat menjadi pengaruh yang buruk dan membawa hasil keputusan yang penuh kesalahan dan bahkan tidak diinginkan.

Groupthink memiliki unsur kolektivitas yang kuat antar individu. Harmoni yang ditekankan tidak selalu membawa hasil keputusan yang baik (Aldag & Fuller, 2004, pp. 239–240). Bahkan, fenomena *groupthink* dalam organisasi mampu membuat tujuan yang hendak diraih malah semakin jauh (Golkar, 2013, p. 226). Karena ketiadaan unsur evaluasi, pemikiran kritis seperti model Karl Popper menjadi jalan keluar. Akibatnya, beberapa kebijakan yang dihasilkan oleh pemikiran *groupthink* memiliki sifat yang riskan. Kebijakannya cenderung agresif, kontras, terkesan kurang bijaksana, dan sulit untuk diterima akal sehat. Dapat disebutkan pula bahwa ambivalensi dapat berakar dari sini. Perumusan kebijakan luar negeri suatu negara tidak terlepas dari bayang-bayang *groupthink*.

Pragmatisme, ambivalensi dan kompleksitas dari penyusunan kebijakan luar negeri menuntut analisis yang komprehensif dan penuh dengan kejelasan. Oleh karena itu, penulis meyakini bahwa kedua teori ini relevan dengan permasalahan yang akan dianalisis di dalam karya tulis ini. Penggunaan dua teori ini juga menjadi aspek kebaruan dan *state of the art* yang dimiliki oleh penulis.

1. 6. Definisi Konsep

Definisi konsep adalah pengertian dan karakteristik variabel-variabel yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini.

1. 6. 1. Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional suatu negara adalah tujuan dan ambisi yang hendak diraih dalam berbagai macam cara dan aksi yang terbaik, biasanya dalam bentuk kekuatan militer, ekonomi maupun politik (Donnelly, 2004, p. 7). Konsep kepentingan nasional merupakan unsur yang penting dalam analisis aktor negara.

1. 6. 2 Kebijakan / Politik Luar Negeri

Seperangkat aturan dan tujuan umum yang memandu kegiatan dan hubungan satu negara dengan negara lainnya (Britannica, 2022). Kebijakan luar negeri ditujukan untuk memenuhi kepentingan nasional suatu negara. Perilaku negara kerap terlihat dari interaksinya dengan negara lain, dan tercermin dalam kebijakan politik luar negerinya. Kebijakan luar negeri diformulasikan oleh lembaga-lembaga terkait dalam suatu negara. Sifatnya dibuat seobjektif mungkin, agar dapat melayani kepentingan nasional negara tersebut. Struktur, mempengaruhi bagaimana suatu kebijakan diambil. Baik secara internal melalui unit-unit politik dan lingkaran pembuat kebijakan, maupun secara eksternal. Secara ekstern, sifat utilitarian dapat menyebabkan negara bersifat pragmatis karena mempertimbangkan kekuatan material negara lain, kekuatan negara sekutu, kapabilitas kekuatan dalam negeri dan hambatan geografis (Lobell et al., 2009, p. 19). Kebijakan luar negeri bersifat dinamis dan akan mengikuti cara terbaik yang dinilai paling menguntungkan kepentingan nasional suatu negara.

1. 6. 3. Struktur Sistem Internasional

Sistem, adalah suatu interaksi antar unit. Sementara struktur, adalah komponen tingkatan yang menyatukan interaksi antar unit menjadi bentuk yang jelas, tidak sebatas kumpulan antar interaksi unit saja (Waltz, 1979, p. 40). Sistem internasional terdiri atas unit-unit kecil, yaitu negara, yang saling berinteraksi untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Melalui kacamata realisme, struktur sistem internasional tidak berubah. Sifatnya masih sama. *There are no night watchmen.*⁴ Setiap negara memiliki kapabilitas dan kekuatan material yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kekuatan dan *status quo* menjadi tujuan yang hendak dicapai, guna mengamankan keselamatan negara dari ketidakpastian. Oleh karena itu, sifatnya anarki. Negara sebagai unit dalam struktur sistem internasional melakukan apa yang sepatutnya dilakukan untuk menolong diri (dan kepentingan) mereka sendiri.

1. 6. 4. Ambivalensi

Ambivalensi adalah sebuah sikap dan kondisi dimana respon terhadap sesuatu memiliki sifat ganda (Bohner & Dickel, 2011). Sifat ganda ini berjalan bersama dan cenderung memiliki corak hipokrisme. Ambivalensi merupakan sikap maupun manuver politik yang kerap dibahas dalam ranah ilmu politik.

1. 7. Operasionalisasi Konsep

Lebih spesifik, variabel-variabel dalam penelitian ini akan diteliti dengan dua teori untuk menjelaskan kontradiksi dalam kebijakan luar negeri Turki.

⁴ Ungkapan ini berarti dalam politik internasional, tidak terdapat wasit atau polisi yang dapat menghukum unit (negara) lain jika melakukan kecurangan.

1. 7. 1. Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fokus Turki terhadap pemenuhan unsur keamanan dan stabilitas ekonomi. Terlebih saat melihat situasi geopolitik regional di kawasan Timur Tengah dan posisi dilematisnya terhadap hubungannya dengan Israel.

1. 7. 2. Kebijakan / Politik Luar Negeri

Pada konsep ini, penulis akan melakukan pengkajian dan triangulasi data dengan rancangan kebijakan politik luar negeri Turki. Caranya dengan mengaitkan teori yang digunakan dengan konsep kebijakan luar negeri Turki. Konsep kebijakan luar negeri Turki yang digunakan adalah “*Strategic Depth*”. Konsep ini dicetuskan oleh Menteri Luar Negeri Turki era Erdoğan, yaitu Ahmet Davutoglu. Adapun indikator yang akan dibahas dari kebijakan luar negeri Turki adalah *realpolitik* (*hard power*). Aspek ini diseimbangkan dengan konsepsi kekuatan nasional Turki yang akan menghasilkan sintesis konsep *idealpolitik*.

1. 7. 3. Struktur Sistem Internasional

Indikator operasionalisasi konsep dalam struktur sistem internasional adalah sifat sistem internasional itu sendiri. Ada beberapa sifat dari sistem internasional yang dapat dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Sifat yang dimaksud adalah anarki, ketiadaan entitas yang lebih kuat daripada negara. Lalu sifat *struggle for power*, menunjukkan bahwasanya dorongan alamiah dari politik adalah perebutan kekuatan. Lalu sifat *self-help* masing-masing negara dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya.

1. 7. 4. Ambivalensi

Ambivalensi menjadi indikator dalam melihat bagaimana Turki memandang hubungan bilateralnya dengan Israel. Penulis memahami bahwa tidak ada satuan baku dalam konsep Ambivalensi ini. Namun terdapat cara yang mudah dalam mengukur konsistensi sikap Turki terhadap situasi geopolitiknya. Ambivalensi dalam penelitian ini melihat sikap dan tren kebijakan luar negeri Turki terhadap Israel dalam masa kepemimpinan Presiden Erdoğan dalam jangka waktu tahun 2014 -2018.

1. 8. Hipotesis Penelitian

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Ambivalensi kebijakan luar negeri Turki terhadap Israel pada masa kepemimpinan Presiden Erdoğan tahun 2014 – 2018 dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal dalam sudut pandang kebijakan politik luar negeri.

1. Faktor eksternal berupa struktur sistem internasional yang bersifat anarki, dan stimulus sistemik dari segi politik dan keamanan yaitu fenomena *Arab Spring*, perang sipil Suriah dan Pemberontakan Etnis Kurdi.
2. Faktor internal berupa politik domestik Turki, yaitu pola birokrasi dalam perumusan kebijakan luar negeri serta pandangan politik Partai AKP dan Presiden Erdoğan.

1. 9. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan analisis terhadap teks maupun gambar sebagai

datanya. Penelitian kualitatif menuntut peneliti untuk mendapatkan berbagai sumber data dan domain, penggambaran jelas terhadap isu atau masalah yang dibahas, serta memiliki refleksi atas interpretasi peneliti berdasarkan pengetahuan dan pandangan yang dimiliki. Sehingga penggambaran masalah yang diteliti dapat dijelaskan dengan baik dan holistik (Creswell & Creswell, 2018, pp. 257–258). Metode kualitatif akan dipadankan dengan studi kasus kebijakan luar negeri Turki dalam hubungan bilateralnya kepada Israel. Melalui analisis deduktif, peneliti berusaha untuk memberikan gambaran dan pemahaman kausalitas secara luas dan komprehensif atas faktor-faktor yang membentuk kebijakan luar negeri Turki kepada Israel yang bercorak Ambivalensi. Tipe ini dipilih berdasarkan tujuan penelitian yang hendak menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Ambivalensi dalam kebijakan luar negeri Turki.

1. 10. Tipe Penelitian

Untuk tipe penelitian, penulis menggunakan tipe eksplanatif-analitis dalam penelitian ini. Penulis melihat tipe eksplanatif sebagai tipe yang tepat, sesuai dengan maksud penulis dalam menjelaskan secara komprehensif, menarik kesimpulan dari fenomena kausalitas atas analisis yang ada. Berkaitan dengan teknik analisis yang akan penulis gunakan. Tentunya dengan teori yang relevan. Pertanyaan kenapa dan bagaimana, akan menjadi kata umum untuk memandu berjalannya penelitian ini.

1. 11. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis adalah teknik studi literatur dan wawancara. Pertama, Studi literatur (termasuk kajian literatur) adalah usaha untuk membaca, memahami, dan mengkaji literatur yang relevan terhadap topik penelitian yang dilakukan. Teknik ini membantu peneliti dalam mendapatkan sumber atau domain, serta teori dan konsep yang relevan dengan topik yang diangkat oleh peneliti. Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder berupa buku-buku dan jurnal elektronik yang dielaborasi satu sama lain. Dan juga *report* dari situs pemerintah terkait yang dapat diakses melalui internet. Data dikumpulkan dari pencarian melalui perpustakaan elektronik dan sumber-sumber jurnal penelitian yang kredibel.

Kedua, teknik pengumpulan data melalui wawancara juga dilakukan untuk memaksimalkan keabsahan data dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan utama dan pertanyaan klarifikasi untuk mendapatkan jawaban yang presisi dan runut (Seidman, 1998). Pertanyaan diatur sebelum pemberian surat izin wawancara. Wawancara dilaksanakan berdasarkan keleluasaan dari narasumber.

1. 12. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis kongruen dalam analisis studi kasus yang diangkat. Analisis kongruen adalah cara untuk menarik sebuah kesimpulan atas studi kasus melalui analisis terhadap data-data literatur yang ada dan memastikan data-data tersebut berisikan konsep serta teori yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti. Rumusan masalah akan menjadi titik pencarian dan

pengujian teori terkait yang digunakan oleh peneliti. Oleh karena landasan teoritis yang peneliti gunakan bercorak positivis, maka teknik analisis ini relevan secara epistemologis. Teknik ini bersifat eksplanatif, dapat digunakan untuk menguji teori maupun hipotesis yang akan dibuktikan melalui observasi dan analisis (Mills et al., 2012, pp. 1–3).

1. 13. Kualitas Data

Dalam analisis data, penulis melakukan pengujian dan verifikasi terhadap data literatur sebagai domain yang dimiliki. Penulis menggunakan beberapa cara dalam melakukan penyaringan kualitas data. Ada dua pengujian yang digunakan penulis. Pertama, penulis melakukan pengecekan representasi data, untuk memastikan data literatur sesuai dan relevan dengan objek yang akan diteliti penulis. Yang kedua, penulis menggunakan metode triangulasi yang mengaitkan teori, relevansi data dengan studi kasus yang diteliti (Huberman et al., 2014, p. 258).

Penelitian ini memiliki data yang baik dan disokong oleh jawaban-jawaban primer dan dilengkapi oleh argumen-argumen sekunder. Data primer didasarkan atas hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muhammad Syaroni Rofii, S.H.I., M.A., Ph.D. sebagai narasumber utama dalam penelitian ini. Data sekunder didapatkan melalui buku-buku tentang pandangan realisme neoklasik sebagai teori yang digunakan dalam penelitian ini. Terdapat jurnal-jurnal dari lembaga *think-tank* dari kedua negara yang menjadi tempat objek penelitian dan *press release* resmi dari Partai AKP di Turki sebagai data sekunder yang tercantum dalam penelitian ini.